banyak.

Tanpa Pamrih

Alumnus IKIP Jakarta ini mengatakan, jika kita beramal dengan tulus ikhlas, insya Allah Tuhan akan memberkatinnya lebih banyak. Dan ia merasa yakin benar. Namun harus diimbangi dengan usaha.

Sebagai bukti, berbagai kegiatan kursus keterampilan di bawah naungan Yayasan Afiat yang dikelolahnya, semuanya berjalan lancar. Terutama di Pusat Kursus Bina Sukses di Komplek Perumahan Jaka Sampurna, Kali Malang, Bekasi.

Demikian pula usaha salonnya di kawasan Pondok Indah Mall, Pasar Raya Blok M dan Citra Land Jakarta.

"Kegiatan tersebut, saya maksudkan sebagai salah satu dharma bhakti ikut menunjang program pemerintah, terutama Pemda DKI Jakarta untuk memberikan lapangan kerja.

Karena masalah satu ini memang begitu kompleks dan harus ditangani terpadu antara pemerintah dengan semua pihak yang berkompeten.

Jika semua pengusaha berorientasi demikian, tentu akan mampu menampung tenaga kerja yang tak sedikit. "Bahkan kegiatan tersebut sekaligus berdampak dari program rencana strategis (renstra) yang dicanangkan Pemda DKI Jakarta, "ujarnya.

Hj. Toety Soelasminiaty bersama para wanita pengusaha Indonesia foto bersama Atase Pertanahan RI di Beijing, Kolonel Eddy dan Nyonya.

Semua kegiatan sosial yang dilakukan, semuanya tanpa pamrih dan Lillahi taala. Karena Hj. Toetty Soelasminiaty merasa yakin bahwa semua kegiatan yang dilakukan dengan ikhlas dan tanpa pamrih akan membawa hikmah besar di dunia dan akherat.

Makin kompleksnya masalah sosial yang dihadapi Pemda DKI Jakarta dewasa ini, juga perlu ditunjang semua pihak. Terutama pengusaha swasta untuk menyediakan lapangan kerja. Apalagi Jakarta diarahkan menjadi kota jasa (service city), peranan swasta akan sangat besar dalam penyediaan lapangan kerja di bidang jasa.

Namun ia juga masih membantu pembangunan daerahnya sebagai upaya pemerataan pembangunan, baik fisik, mental dan spiritual.

Buku Rumah Susun

Sebagai warga kota Jakarta, Ny. Toetty ternyata jeli mengamati masalah sosial serta perumahan di DKI Jakarta. Itulah sebabnya, sebagai seorang pengusaha sukses dan penulis, ia juga menulis buku berjudul **Rumah Susun Kita** bersama anggota Wanita Penulis Indonesia (WPI).

Buku ini pernah diserahkan ke Gubernur DKI Jakarta, Surjadi Soedir-dja sebagai sumbangsih dari para penulis terha-dap kota Jakarta.

Isi buku tersebut antara lain mencakup masalah kebijaksanaan rumah susun yang bisa menjadi informasi positif bagi masyarakat serta upaya memasyarakatkan rumah susun di DKI Jakarta. Karena, program tersebut ternyata hingga kini belum begitu memasyarakat.

Ketua Yayasan Afiat ini dalam rangka mencari bibit-bibit penulis wanita, pihaknya membuka kesempatan para wanita dan remaja yang berbakat menulis bergabung di Yayasan yang dike-lolahnya.

Mereka bisa memperdalam pengetahuannya di bidang tulis-menulis melalui Bina Sukses Yayasan Afiat di Jaka Sempurna, Jl. Raya Kali Malang, Bekasi.

"Pembinaan para penulis remaja dan ibu-ibu rumah tangga di Bina Sukses Yayasan Afiat tersebut kami maksudkan untuk memperluas wawasan mereka dalam dunia tulis-menulis.

Setelah memperoleh pembinaan di Yayasan itu, mereka diharapkan segera bisa hidup mandiri. Masih banyak masalah yang dihadapi Pemda DKI Jakarta untuk diangkat ke permukaan, mengacu pada isi dari Renstra 1992-1997 dan menjadikan Jakarta sebagai kota jasa yang "Teguh Beriman," ujarnya. **(su)**

SUHARSO, PLH. KADIS KEBAKARAN DKI JAKARTA :

DALAM DUNIA KERJA JANGAN SALAH FUNGSI

JUMPA dengan Plh. Kepala Dinas Kebakaran DKI Jakarta, (Letkol (Art) Suharso, kesan pertama sangat menyenangkan selain ramah, sesekali ia juga mengajak bersendagurau dan tak jarang mengundang tawa disela-sela perbincangan. Mungkin sosoknya sangat sesuai dengan instansi yang dipimpinnya sebagai pelayan masyarakat, yaitu pemadam kebakaran.

Suatu hal yang menarik dari pria kelahiran Pacitan, Jawa Timur, 28 September 1944 ini, mempunyai prinsip tidak boleh melampaui batas dalam bekerja. Dan mengiba-ratkannya sebagai anggota tubuh yang mempunyai fungsi dan peranan masing-masing.

Sejak dilantik menjabat Wakil Kepala Dinas Kebakaran pada 1 April 1992, ia menyadari betul tugas dan perannya sebagai wakil yang diibaratkannya sebagai leher. Yang berfungsi hanya menelan dan meneruskan ke anggota tubuh lainnya. Begitu juga dalam dunia kerja. "Jangan salah fungsi dan harus segera disadari," kata Suharso.

Artinya sebagai leher fungsinya tidak boleh sebagai kepala. Yang paling penting bagi Suharso, jangankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin dan tekun dalam bekerja. Dan berkat ketekunnannya inilah ia pada 27 Oktober 1995 lalu, dilantik sebagai Plh. Kepala Dinas Kebakaran DKI Jakarta, dan sejak itu ia memulai perannya sebagai kepala.

Dalam langkah awalnya sebagai kepala, Suharso melakukan pembenahan dari dalam yaitu mengupayakan peningkatan keterampilan dan kesejahteraan karyawan dinas kebakaran yang berjumlah 2.602 orang.

Keterampilan merupakan program awal yang diterapkan Suharso, karena dinilai dengan program ini kualitas keterampilan para petugas dapat ditingkatkan, ini diutamakan bagi petugas lapangan. Sehingga bahaya kebakaran dapat diantisipasi sedini mungkin, serta dapat menekan angka kerugian sampai seminimal mungkin. Tentu saja bantuan semua pihak juga sangat mendukung dalam berperan serta.

Sedangkan untuk kesejahteraan bagi karyawannya menurut Suharso, perlu diperhatikan. Bukan berarti selama ini mereka belum sejahtera, tetapi perlu peningkatan. Hingga dapat memotivasi mereka dalam bekerja dengan ikhlas dan tidak terlalu banyak beban yang ditimbulkan dalam keluarga.

Dengan begitu diharapkan sistem kinerja mereka terus meningkat. Suharso juga mengharapkan, adanya masukan dari berbagai pihak, tanpa bantuan itu tujuan ingin menegakkan citra dinas kebarakan sulit akan terwujud. "Kami sangat menyadari bahwa tugas yang kami emban adalah melayani dan mengayomi masyarakat agar terhindar dari segala bahaya kebakaran. Tanpa bantuan berbagai pihak akan sulit mencapai sasaran," ujar Suharso kepada *Media Jaya.*

Suharso sangat sadar akan tugas pokok instansi yang dipimpinnya sebagai pelayan bagi masyarakat. Untuk itu sebagai pimpinan ia ingin menciptakan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat itu sendiri, Suharso mengharapkan, untuk melapor sesegera mungkin bila di sekitar lokasi terjadi keba-karan, jangan menunggu sampai meluas, yang akibatnya jumlah kerugian akan tinggi.

Suharso juga berharap kepada masyarakat agar mau mengontrol kegiatan petugas di lapangan. "Bila ada petugas yang nakal silakan melapor, bila perlu lapor kepada pihak kepolisian terdekat. Untuk oknum-oknum yang demikian saya tidak akan segan-segan menindaknya," kata Suharso.

Suharso tamatan Akabri tahun 1968. Pada 1969 Danton Yon RH 2/VIII/BRW, 1972 Wadan Raipur, 1973 Pasi II, 1974 Karodalta, 1976 Paursiapta Pullahtadam VIII, 1977 Karodalta, 1979 Karoopslahta Pulliahdatam XII/TRP, 1980 Waka Pullahta Dam XII, 1983 Karosisbandik, 1984 Kabagsisdik Dispullatad, 1985 Kabaggregring Babinminvennt Caddam Jaya, 1987 Pabandya Binker Spersdam Jaya, 1992 Wakil Kepala Dinas Kebakaran DKI Jakarta, dan tahun 1995 Plh. Kepala Dinas Kebakaran DKI Jakarta hingga sekarang. **(Eh)**

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dr. Aslan Lasman, SKM

DOKTER YANG SUKA GADO-GADO

TAMPAKNYA, Dr. Aslan Lasman, SKM, lebih beruntung nasibnya ketimbang empat saudara kandungnya. Dia menjadi dokter berkat didikan keras dari otangtua "angkat"nya yang masih saudara.

"Saya waktu itu ikut saudara yang kebetulan tidak mempunyai anak, sedangkan saudara-saudara saya tetap ikut orangtua kandung, juga di Jakarta," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang asli Betawi ini kepada Med*ia Jaya* baru-baru ini.

Orangtua "angkat"nya itu mendidik Aslan secara keras karena menginginkan Aslan kelak jadi "orang" tidak seperti dia yang pedagang kecil. "Dari lima saudara kandung, saya nomor kedua dan yang jadi," kenang Aslan.

Begitupun dalam hal pendidikan, orangtua "angkat" Aslan senantiasa memperhatikan secara sungguh-sungguh. "Waktunya sekolah mesti sekolah, sekalipun misalnya saya sedang membantu berdagang. Dan kalau sudah waktunya belajar, ya mesti belajar, tidak boleh tidak," kenang Aslan.

Begitupun dengan kelengkapan sekolah, sekalipun kehidupan orangtua "angkat"nya itu serba terbatas, tapi demi kemajuan pendidikan Aslan, segala kebutuhan sekolahnya senantiasa dipenuhi.

Karena sejak kecil hidup penuh disiplin disertai kemauan yang tinggi, membuat Aslan terbiasa dengan pola hidup seperti itu hingga sekarang. "Tapi bukan berarti saya waktu kecil tidak ada kesempatan untuk bermain. Namanya anak-anak, tetap saja saya bisa bermain dengan teman-teman sebaya," katanya.

Aslan lahir di Jakarta, 17 Juli 1942. Dia baru mengerti akan cita-citanya ketika menginjak SMP kelas dua. Waktu itu dia ingin ke teknik, menempuh studi di Institut Teknologi Bandung (ITB), tapi karena kemampuan orangtua "angkat" kurang mendukung maka dia memilih UI dengan pertimbangan lokasi kampusnya di Jakarta.

"Begitu lulus SMAN 3 Setiabudi, teman-teman mendaftar ke Fakultas Kedokteran UI dan saya ikutan saja. Itu tahun 1962. Tapi saya juga memilih cadangan yakni sekolah akuntansi. *Alahmdulillah*, saya lulus pada tahun 1970," kata Aslan.

Prinsip untuk hidup mandiri sudah diterapkan oleh Aslan sejak muda, bahkan dia sempat bekerja sore hari sambil kuliah. "Waktu itu kuliah kita sering *vakum* karena keadaan yang tak menentu, setelah berlangsung peristiwa G30S PKI," kata Aslan yang turut pula dalam kegiatan aksi KAMI/KAPPI sampai tertembaknya Arief Rachman Hakim, rekan seangkatan Aslan.

"Kalau praktikum, dia di sebelah saya," kata Aslan mengenang tokoh mahasiswa UI yang gigih berjuang menentang rezim kala itu.

Setelah meraih gelar dokter, Aslan menempuh

Foto bersama keluarga

program WKS (Wajib Kerja Sarjana). Kebetulan waktu itu Departemen Kesehatan sedang membutuhkan tenaga dokter untuk ditempatkan di Pulau Buru, satu lokasi pemukiman tahanan politik PKI golongan B.

Aslan menerima tawaran itu, tapi dengan syarat waktu tenggang yang empat bulan sebelum bertugas

di pulau tersebut, dia tidak mau menganggur. Karena itu, Aslan dikirim ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang Kepala Dinasnya waktu itu Dr. Herman Susilo. Aslan langsung ditunjuk sebagai Kepala Puskesmas Kelurahan Pekojan Jakarta Barat.

Begitu tugas WKS tiba, pada Juli 1971, berangkatlah Aslan ke Pulau Buru bersama dr. Darmawan. Dengan seorang perawat, di sana Aslan bertugas memelihara dan memberikan pengobatan kepada tahanan politik di dua unit dari delapan belas unit yang ada. Satu unit terdiri 800 orang dan jarak per unitnya cukup berjauhan.

"Saya tinggal di unit I sehingga tidak tiap hari ke unit lainnya, kecuali kalau ada panggilan. Umumnya kesehatan mereka waktu itu baik-baik. Dan kendalanya cuma transportasi," kata Aslan.

Ada satu peristiwa yang tak terlupakan bagi Aslan di sana. Waktu itu dia kedatangan pasien yang mengalami kecelakaan *ketiban* (tertindih) pohon besar. Karena luka yang sangat parah dan peralatan terbatas, orang itu keburu meninggal sebelum sempat di bawa ke rumah sakit kecamatan.

"Kondisinya sudah begitu krisis sehingga tak dapat tertolong," kata Aslan tak melupakan peristiwa itu hingga sekarrang.

Diberi Kemudahan

Setelah sekitar satu tahun bertugas di Pulau Buru, Aslan langsung diberi kemudahan-kemudahan oleh Depkes, mengingat penempatan ke pulau itu mempunyai kekhususan.

"Saya diminta bebas untuk memilih, apakah mau menempuh spesialisasi atau langsung bekerja. Tapi karena saya sudah kadung janji kepada dokter Herman, saya kembali bekerja di Dinas Kesehatan DKI," kata Aslan.

Aslan langsung dikirim ke Dinas Kesehatan DKI dan ditempatkan di Puskesmas Kelurahan Mapar, Kota, sebagai Kepala Puskesmas. Kira-kira setahun, langsung dipindahkan ke Puskesmas Kecamatan Tambora Jembatan Lima, Jakarta Barat, juga sebagai Kepala Puskesmas.

Setelah itu ditarik ke Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat sebagai Kepala Seksi. Setahun di sana, Aslan menempuh studi di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI selama satu tahun. Lantas Aslan langsung diangkat sebagai Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat selama tujuh tahun.

Dari situ, Dr. Soeharto Kepala Dinas Kesehatan DKI waktu itu, meminta Aslan mengisi jabatan di Kanwil Depkes DKI sebagai Kepala Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi. Aslan bertugas selama enam tahun di sana.

Kemudian terjadi pemisahan antara Kanwil Depkes DKI dan Dinas Kesehatan DKI yang sebelumnya jabatan sebagai Kepala dirangkap. Karena jabatan sebagai Wakil Kepala Dinas Kesehatan kosong sejak lama, maka Aslan diminta untuk mengisinya sejak awal 1994.

Dan akhirnya 30 Agustus 1995, Aslan yang mempunyai ayah kandung seorang pengemudi Departemen P & K itu, dipercaya oleh Gubernur menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan DKI menggantikan Dr. Soeharto yang masuk pensiun.

Atas keprcayaan yang diberikan itu, Aslan merasa bersyukur dan akan menjalankan tugas sesuai dengan kemampuan. Aslan lebih menganggap kepercayaan itu sebagai rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa mengingat jenjang karirnya dimulai sejak dari bawah.

Langkah pertama yang dilakukannya begitu dia menjabat sebagai Kepala Dinas adalah melakukan konsolidasi dan menegakkan disiplin kerja sesuai dengan instruksi Gubernur.

"Sekalipun masih menemui kesulitan-kesulitan, disiplin kerja akan terus-menerus ditingkatkan setiap waktu", kata Aslan.

Langkah lain adalah melakukan penyegaran baik di tingkat dinas maupun suku dinas dan kaderisasi. Tujuannya adalah menghindari kejenuhan. "Biasanya orang akan jenuh kalau yang dikerjakan itu-itu saja apalagi dalam waktu yang cukup lama, sehingga perlu variasi," kata Aslan.

Sedangkan bagi yang berprestasi dan ada kemauan, Aslan mendorongnya dengan meningkatkan pendidikannya baik di dalam maupun luar negeri. Diakui, kualitas sumber daya manusia di Dinas Kesehatan cukup memadai sekarang ini, karena rata-rata dokter.

Sebagai Kepala Dinas, volume pekerjaan Aslan sekarang ini makin meninggi dan sangat sibuk. Namun kesibukan sesungguhnya merupakan hal yang sudah biasa bagi Aslan. Karena itu, kesibukannnya tidak lantas menjadi problema di dalam menjalin komunikasi dengan istri dan anak-anaknya. Apalagi anak-anaknya sudah besar-besar sehingga mempunyai kesibukan sendiri-sendiri.

Berpasangan dengan Nursiah, Aslan yang memiliki hobi jalan pagi dan tenis meja selain suka makanan gado-gado ini, dikarunia tiga orang anak (satu perempuan, dua laki-laki) yang kesemuanya masih kuliah di perguruan tinggi di Jakarta.

Ditanya soal obesi, Aslan berharap derajat kese-

hatan warga DKI Jakarta makin baik. Selain itu, diharapkan pertolongan dapat dilakukan secara cepat dan tepat dengan tidak pandang bulu status ekonominya.

"Terlebih bagi rumah sakit swasta, diharapkan benar-benar menerapkan kebijakan fungsi sosial dengan mengalokasikan 25% dari tempat tidur bagi orang yang tidak mampu," pintanya.

Namun Aslan mengimbau kepada masyarakat agar menjaga kesehatannya secara baik dengan berolahraga secara teratur, makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Mengapa? Karena kesehatan itu bagi kehidupan manusia sangat berarti.

"Dengan tubuh yang sehat, niscaya kita dapat melakukan apa saja untuk meraih kemajuan. Apalagi PJP II mencanangkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, di mana kesehatan mengambil posisi yang amat penting," kata Aslan.

Makin Membaik

Menurut Aslan, derajat kesehatan warga DKI Jakarta semakin membaik dari tahun ke tahun. Ini dapat dilihat dari beberapa indikator seperti angka kematian bayi semakin menurun hingga sekarang mencapai 32 per 1.000 kelahiran hidup dari 71 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 1980. Indikator lainnya adalah umur harapan hidup yang makin membaik hingga mencapai 69 tahun.

Karena prestasi Pemda DKI yang baik di bidang keehatan, Bapak Gubernur telah menerima penghargaan dari Pemerintah berupa Kegiatan Bakti Husada dan Ksatria Husada Aditia.

Kendati begitu, hingga sekarang penyakit-penyakit infeksi masih mendominasi di DKI Jakarta dengan terbanyak kasus infeksi saluran pernafasan atas, disusul penyakit bukak lambung.

Sedangkan penyakit endemis yang tiap tahun penderitanya selalu ada adalah demam berdarah. Sementara untuk diare sejak empat tahun yang lalu tidak ada KLB (Kejadian Luar Biasa) sekalipun yang menderita masih ada.

"Ini semua karena pengetahuan masyarakat akan hidup sehat makin meningkat di samping penyediaan air bersih di DKI Jakarta makin memadai," kata Aslan.

Namun, belakangan ini penyakit-penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, stroke serta stress ditambah AIDS (Gejala penurunan kekebalan tubuh) makin meningkat penderitanya di Jakarta.

Kasus HIV/AIDS di Jakarta paling tinggi dibanding dengan propinsi lainnya. Ini karena menyangkut perilaku seseorang yang suka berganti-ganti pasangan. "Sebab penularannya paling tinggi melalui hubungan seks," kata Aslan.

Menurut Aslan, kesemuanya itu merupakan konsekuensi dari kemajuan pembangunan disamping derasnya arus informasi dan komunikasi dalam era globalisasi sekarang ini. Akibatnya, di masyarakat terjadi perubahan pola dan gaya hidup sampai ke selera makanan.

"Lihat saja, sekarang ini banyak menjamur makanan yang berkolesterol tinggi yang berpotensi menimbulkan penyakit jantung," kata Aslan. Hal lain, sekarang ini orang tampak kurang bergerak/olahraga.

Kebijakan untuk menanggulangi penyakit noninfeksi seperti itu belum menjadi program Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Kendati begitu, Aslan mengharapkan peran aktif organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk turut menangani masalah tersebut.

"Sebab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tidak bisa ditangani oleh pemerintah saja tapi juga perlu dukungan dan peran aktif masyarakat itu sendiri," kata Aslan sambil menyebut beberapa LSM yang sudah menunjukkan peran aktifnya seperti Yayasan Jantung Indonesia atau Yayasan Kanker Indonesia, lions, rotary & PKK.

Untuk sarana kesehatan seperti RSUD yakni RSUD Koja Jakarta Utara dan RSUD Pasar Rebo Jakarta Timur sedang dalam proses peningkatan dari kelas C menjadi kelas B. Konsekuensinya, sumber daya manusianya perlu ditingkatkan, misalnya menambah tenaga dokter spesialis, selain meningkatkan kapasitas tempat tidur di atas 200, serta peralatan medik.

Bahkan gedungnya ditingkatkan hingga mencapai 8 lantai. Sedangkan 2 RSUD lagi yakni RSUD Tarakan dan RSUD Budi Asih belum diperbaiki karena keterbatasan lahan.

Dibandingkan dengan propinsi lain, ratio jumlah tenaga dokter dengan jumlah penduduk di DKI Jakarta, jauh lebih memadai. Jumlah dokter umum yang tercatat mencapai 2.580 orang, 905 tenaga dokter spesialis, dan 1.417 tenaga bidan.

Jumlah sarana kesehatan di DKI Jakarta juga sudah cukup memadai seperti rumah sakit umum sudah berjumlah 100 buah, ditambah 321 puskesmas yang tersebar di 43 kecamatan dan di kelurahan serta 662 apotik plus balai-balai pengobatan dan klinik yang jumlahnya cukup banyak.

"Dengan beragamnya sarana kesehatan di DKI Jakarta, orang bisa memilih untuk berobat sesuai dengan kemampuan masing-masing," kata Aslan. **(DJI)**

Ketua Bappeda DKI Jakarta, Ir. Budihardjo Sukmadi, MSi

Insinyur Sipil yang Selalu Ingin Belajar

Ir. Budihardjo Sukmadi, MSi bersama keluarga

IR BUDIHARDJO SUKMADI, MSi yang biasa dipanggil Budi dibesarkan di lingkungan keluarga dengan pola hidup yang penuh keteraturan dan disiplin. Ini karena ayahnya, Sukmadi asal Purwokerto, adalah seorang pegawai negeri (dinas kesehatan) yang semula guru.

Keluarga Sukmadi menerapkan satu hirarkhi bahwa yang muda harus *nurut* kepada yang lebih tua. Hirarkhi inilah yang menciptakan keteraturan dan kepatuhan baik kepada orangtua maupun antar saudara di keluarga besar tersebut.

Budi misalnya, sebelum berangkat sekolah mesti membantu pekerjaan dagang ibunya. Sebagai anak-anak, waktu itu Budi sempat *ngomel* dalam hati. Tapi kemudian dia memetik hikmahnya bahwa membantu pekerjaan orangtua merupakan satu cara menanamkan tanggungjawab sejak dini selain meningkatkan kepatuhan dan melatih disiplin.

"Memang saat itu saya merasa hak bermain dikurangi, tapi ternyata nilai tambahnya lebih besar ketimbang hanya bermain-main dengan teman-teman yang tak ada gunanya. Toh saya menganggap waktu untuk bermain-main sudah cukup," kata Budi yang senang sepak bola dan tenis.

Perhatian Sukmadi terhadap pendidikan anak-anaknya (semua 12 orang = 6 laki-laki, 6 perempuan) cukup besar. Budi misal-nya, sebagai anak ke-2 berhasil meraih gelar insinyur sipil dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 1967. Budi yang lahir di Cilacap, 22 Mei 1943 sejak usia SD pindah ke Tegal sampai lulus SLTP. Sedang-kan SLTA ia menyelesaikan di Purwokerto.

Budi banyak menerima petuah dari orangtua, antara lain agar berkelakuan jujur dan rajin. Petuah itu dijunjung sampai sekarang bahkan menjadi falsafah hidupnya. "Dengan kejujuran, segalanya akan lebih mudah mengatasi berbagai masalah," kata Budi yang meneruskan petuah tersebut kepada anak-anaknya.

Dengan satu kalimat Budi menjabarkan falsafah tersebut bahwa: *kita harus menekuni pekerjaan yang sedang dilakukan*. Artinya, harus bekerja sebaik-baiknya dengan cara yang baik pula. Sejak kecil Budi memang bercita-cita ingin menjadi insinyur. Bakat menggambar sudah tampak terutama menggambar wayang. Kakeknya, seorang "pemborong", memuji gambar Budi bagus-bagus. "Wah, gambarnya bagus, kamu nanti jadi insinyur, ya," kata Budi mengutip keinginan kakek yang masih *terngiang-ngiang*

sampai sekarang.

Tapi waktu Budi lulus SLTA, ibunya Siti Halimah asal Tegal, malah mendorong agar masuk ke fakultas kedokteran. Namun karena keinginan menjadi insinyur sudah terobsesi sejak kecil, maka Budi memutuskan mendaftar ke Fakultas Teknik UGM Yogyakarta.

Begitu lulus, Budi langsung bekerja. Kebetulan waktu itu diberlakukan Wajib Kerja Sarjana. Budi diterima di PN Perhutani di Kalimantan.

Tapi begitu tiga tahun, ia berpikir bahwa karirnya sebenarnya tidak di kehutanan karena ia insinyur sipil. Lantas Budi memutuskan hijrah ke Jakarta dan mendirikan perusahaan kontraktor kecil-kecilan.

Setelah tiga tahun berwirausaha, Budi merasa menjadi kontraktor tidak cocok dengan hati nurani. Ia ingin mengabdi di pemerintahan. Kebetulan ada iklan lowongan di Pemda DKI. Melamarlah Budi.

Setelah dites, dari sebanyak 20 orang insinyur, Budi dinilai lebih cocok ditempatkan di Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Mulailah ia bekerja di sana tahun 1971. Beberapa lama di Bappeda, Budi merasakan bidang pekerjaan itu berbeda dengan apa yang dibayangkan sebelumnya.

Tapi karena motivasinya kuat, maka ia melakukan penyesuaian bahkan mempelajarinya sungguh-sungguh. Untuk memperdalam, Budi belajar ke Inggris pada 1974 dengan mengambil *degree* (kursus), khusus perencanaan pembangunan selama 4 bulan.

Tahun berikutnya, pergi ke Bangkok mengikuti kursus komputer selama empat bulan, lantas mengikuti seminar di Jerman serta kursus tentang transportasi di Amerika Serikat. Semua ini karena keingintahuannya begitu tinggi.

"Memang kita tidak boleh berhenti belajar, sebab sampai sekarang pun masih banyak yang perlu saya pelajari," kata Budi yang memiliki hobi membaca.

Seiring dengan itu, karir Budi meningkat. Semula staf kemudian diangkat menjadi Kepala Seksi Perhubungan terus diangkat menjadi Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

Enam tahun di situ, Budi ditarik menjadi Kepala Dinas Lalu Lintas Jalan Raya sampai 1989, terus ditarik lagi ke Bappeda sebagai Wakil Ketua dan akhirnya pada September 1995 dipercaya menjadi Ketua Bappeda.

Budi merasa bersyukur atas karirnya yang cepat melesat. Ini tak lain karena etos kerjanya tinggi sehingga terbiasa bekerja keras. Jangan heran kalau misalnya melihat Budi pulang ke rumah sampai malam.

Istri dan anak ternyata bisa memahami cara hidupnya. Pun terhadap kebiasaannya yang suka membawa pekerjaan ke rumah. Malah anak yang pertama (Pramita) "sejalan" karena kuliah di jurusan planologi Institut Teknologi Indonesia (ITI).

"Bersama Pramita, saya malah berdiskusi tentang perencanaan kota. Tesis yang diambil Pramita juga tentang pantura. Ini kan bisa menjadi topik pembicaraan di rumah," kata Budi.

Sedangkan anak ke-2 dari pasangan Budi-Nur Utami ini adalah laki-laki (Prito) yang sedang belajar jurusan bisnis di Fransansisko. "Dengan adanya kepercayaan dari istri dan anak-anak, saya bersikap fleksibel mengatur waktu kencan dengan mereka, apalagi waktu kerja di Bappeda begitu padat," kata Budi.

Ingin tahu

Yang menarik dari tokoh ini adalah keingintahuannya yang tinggi sehingga mendorong mempelajari hal-hal yang baru (*up to date*).

Bidang pekerjaan yang digelutinya selama 22 tahun itu, memang menuntut demikian. Wawasan mesti luas, tidak hanya mencakup teknik perencanaan, tapi juga banyak bidang seperti geografi, transportasi, sosial-politik maupun ekologi lingkungan.

Karena itu, pada 1982-1985 Budi memperdalam ilmu lingkungan dengan menempuh studi S-2, yang waktu itu baru pertamakali didirikan di Universitas Indonesia.

Etos kerja tinggi dan motivasi ingin maju kemudian disosialisasikan di lingkungan Bappeda. Ia selalu menekankan kepada staf bahwa kesempatan untuk maju selalu ada.

"Apalagi di Bappeda ini, sebagai satu unit yang dekat dengan Gubernur, dia dituntut harus selalu maju. Mulai dari staf sampai ketua, di mata gubernur adalah sama. Sehingga masing-masing individu harus mempunyai wawasan, persepsi dan motivasi yang sama mengingat tugas Bappeda merumuskan kebijaksanaan perencanaan untuk proyek-proyek Gubernur," kata Budi.

Tidak ada perbedaan hirarkhi di Bappeda didalam menggarap satu konsep kebijaksanaan untuk Gubernur. Karena itu, Budi menganggap untuk memecahkan masalah tidak mesti ditempuh dengan cara komunikasi yang formil.

Budi lebih suka - dan menganggap lebih efektif, kalau komunikasi dilakukan secara in-formil. Misal-

nya mendatangi Kepala Bidang atau Kepala Seksi guna membahas satu masalah. "Kita pun menjadi tahu apa kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh staf," kata Budi.

Mulai dari Kepala Bidang sampai Kepala Seksi ditekankan agar lebih banyak melakukan kegiatan komunikasi in-formil. "Sebab adakalanya staf lebih tahu daripada kita," kata Budi memberi alasan.

Karena itu dianjurkan agar jangan segan-segan bertanya kepada staf. "Kalau tidak seperti itu, tidak mungkin kita dapat kuasai permasalahan di Bappeda," kata Budi yang tak segan-segan pula mendiskusikan masalah dengan stafnya.

Tapi bukan berarti komunikasi formil tidak dilakukannya. Secara berkala digelar rapat-rapat formil. "Setelah masing-masing mengemukakan pendapat dalam rapat resmi, maka kalau sudah diputuskan secara formil, dia harus loyal," kata Budi lagi.

Mengingat tugas pokok Bappeda adalah melakukan koordinasi, maka Budi minta kepada staf untuk terus menerus meningkatkan kemampuan berkoordinasi. "Agar mampu melakukan koordinasi, berarti dia terlebih dahulu harus menguasai masalah dan mampu memimpin pembahasan," kata Budi.

Kepada bawahan, Budi selalu mengingatkan pula bahwa pekerjaan itu ibadah. Mengingat ibadah merupakan tujuan hidup maka mengerjakan tugas mesti berdasar pada peraturan yang telah digariskan. "Kalau mau *macem-macem* silahkan cari jalan dan cara yang lain," pinta Budi kepada staf-stafnya.

Kondisi kualitas sumberdaya manusia (SDM) di Bappeda sampai sekarang cukup memadai karena secara berkala kemampuan SDM ditingkatkan baik formil maupun in-formil. Yang berlatar S-2 sekarang ini ada 3 orang ditambah 4 orang yang sedang studi di dalam dan luar negeri. Selain itu Bappeda mempunyai tim pakar (staf ahli).

Menurut Budi, posisi Bappeda penting di dalam mempersiapkan perencanaan yang betul-betul *feasible* terutama untuk proyek-proyek yang strategis dan besar sebelum diajukan kepada Gubernur, misalnya proyek *sub-away* (kereta api bawah tanah), pantura, dan sebagainya.

"Jadi mulai dari penyusunan konsep, perencanaan, studi kelayakan, sampai pembentukan lembaga dan sistem pembiayaan adalah tugas-tugas Bappeda. Nah, kalau sudah jadi, kita bisa lepas, dan tinggal monitoring saja," kata Budi.

Berat

Mengingat posisi Bappeda begitu penting dan vital "membawa Jakarta mau kemana", Budi menganggap tugas sebagai Ketua Bappeda cukup berat. Tapi karena bidang itu sudah digeluti sejak lama, ditambah motivasi "belajar" yang tinggi, Budi berharap dapat menyelesaikan tugas-tugasnya secara baik.

"Dekat Gubernur kan *deg-degan* terus. Dan tidak selalu pekerjaan dapat selesai secara *mulus* karena apa yang disajikan kadang tidak cocok dengan Gubernur. Beginilah suka dukanya. Kalau *selamet ya* dipakai terus, kalau tidak ya diganti," kata Budi sambil tertawa.

Sejak menjadi staf, Budi sering mempunyai ide/gagasan. Sering juga ide itu tidak cocok dengan pimpinan. Tapi ide itu dia simpan. "Berdasarkan pengalaman, ide yang tidak disetujui sekarang, bisa saja dua tahun kemudian bisa digunakan," kata Budi.

Menurut Budi, tidak disetujui mungkin karena waktunya yang tidak cocok atau memang pimpinan memiliki visi yang lain. Artinya, apa yang disampaikan belum sesuai dengan keadaan dan persoalan yang hendak dipecahkan saat itu. Berpandangan seperti ini ternyata membuat Budi tidak lekas putus asa, apalagi kecewa berat.

Sebaliknya, kalau satu konsep sudah ditetapkan menjadi kebijaksanaan, Budi akan bersikap loyal kepada pimpinan, sekalipun mengundang pro-kontra di masyarakat.

"Kalau muncul polemik di masyarakat, kita mesti lihat dari posisi pimpinan. Apalagi pimpinan memberi keyakinan, kita mesti *all-out* mensukseskannya," kata Budi mengambil contoh rencana pembangunan pantura yang mengundang polemik.

Menurut Budi, kaderisasi di Bappeda sangat penting supaya pembangunan bisa berkesinambungan. Karena itu, kaderisasi di Bappeda mesti betul-betul terprogram agar tidak menghambat pelayanan kepada pimpinan.

Budi menganalogikan, Gubernur bisa diganti lima tahun sekali sesuai dengan peraturan, tapi orientasi dan kebijaksanaan pembangunan di DKI sangat dipengaruhi oleh persiapan kaderisasi di lingkungan Bappeda.

Karena itu, untuk memilih Wakil Ketua Bappeda saja harus memenuhi berbagai persyaratan, antara lain mesti memiliki wawasan luas selain menguasai bidang fisik dan tata ruang dan bidang-bidang lainnya. "Cukup sulit memang menciptakan kaderisasi terprogram," aku Budi. **(DJI)**

PEMERINTAHAN

Gubernur Surjadi menyampaikan pesannya kepada peserta Konregbang '95 wilayah B, Jawa-Bali

Surjadi Soedirdja

KONREGBANG BERMAKNA STRATEGIS

Konsultasi ini mencari titik temu, dan pemecahan masalah antar daerah, terutama mengatasi masalah perencanaan dan pembangunan yang berwawasan regional.

ARI itu 2 Oktober '95. Berbagai pejabat terkait: Mendagri, para gubernur se Jawa dan Bali, Dirjen, Asmen, deputi, Ketua DPRD DKI dan para peserta lainnya berkumpul di Jakarta.

Mereka mengadakan rapat Konsultasi Regional Pembangunan (Konregbang) Kelompok Wilayah B, guna mencari konsensus untuk upaya perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian hasil pembangunan mendatang.

Tuan rumah ialah DKI Jakarta. Menyambut Konregbang itu, Surjadi Soedirdja sebagai Gubernur KDKI Jakarta mengatakan, Konregbang ini bermakna sangat penting dan strategis.

Gubernur mengharapkan rapat Konregbang ini sukses mencapai kesepakatan dan kebersamaan dalam merealisasikan program pembangunan di enam wilayah propinsi DT. I Jawa-Bali.

Ditekankan, penting adanya program kepentingan bersama sesuai potensi wilayah masing-masing. Diantaranya sistem komperatif terpadu. Maksudnya, tiap daerah menampilkan potensi keunggulannya sendiri-sendiri, tapi secara terpadu.

Karena, menurut Surjadi, pembangunan skala lokal, regional dan nasional tak mungkin berjalan baik tanpa koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dan antara daerah dengan daerah.

Pendekatan perencanaan di daerah kini tak mungkin lagi dibatasi wilayah masing-masing dengan mengabaikan keterkaitan dengan daerah lain, terutama berbagai daerah yang berbatasan.

Makin majunya Teknologi Informasi dan Komunikasi, batas dan jarak antar Daerah bahkan antara Negara, tidak lagi menjadi masalah.

Kenyataan ini menuntut saling keterbukaan informasi dan perencanaan serta daya antisipasi jauh ke depan agar siap diri menghadapi kenyataan yang mungkin akan terjadi.

Kegiatan penglaju (*commuters*) misalnya, yang sudah terjadi antara DKI Jakarta dan Wilayah BOTABEK-JAWA BARAT, fungsionalisasi Daerah-daerah sesuai potensinya dan lain-lain tanpa harus saling merugikan, bahkan sebaliknya akan saling menunjang tercapainya tujuan Pembangunan Nasional.

Maka, Surjadi menilai Konsultasi Regional Pembangunan Kelompok Wilayah B ini bermakna sangat khusus.

Konsultasi ini akan mampu mencari titik temu dan pemecahan masalah antar Daerah, juga merupakan langkah positif, ke arah upaya mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah perencanaan dan pembangunan yang berwawasan Regional.

Gubernur didampingi Mendagri Yogie SM. seusai membuka Konregbang wilayah B tahun 1995

Bagi DKI Jakarta dengan diselenggarakannya Konsultasi Regional Pembangunan Kelompok Wilayah B ini tentu saja merupakan kesempatan sangat berharga.

Soalnya, berbagai masalah yang dihadapi Pemerintah DKI Jakarta saat ini antara lain Kependudukan/Urbanisasi, Perumahan, Transfortasi dan lain sebagainya.

Hal ini tidak mungkin dapat dipecahkan sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan Daerah-daerah lain. Terlebih geografis wilayah DKI Jakarta hanya merupakan bagian kecil dibanding seluruh wilayah Kelompok B.

Maka permasalahan yang dihadapi DKI Jakarta tentu saja memerlukan dukungan dan kerja sama, bukan saja dengan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat melalui kerjasama Pembangunan JABOTABEK, tapi juga dengan Daerah lain.

Bahkan sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia seharusnya pembangunannya menjadi tanggung jawab bersama.

Surjadi berharap Konsultasi Regional Pembangunan Kelompok Wilayah B Tahun 1995, mampu menghasilkan saling pengertian dan kerjasama yang memberikan bobot lebih berarti dalam memecahkan problematik Regional.

Lebih dari itu diharapkan juga mampu mempererat ikatan rasa kebersamaan antar propinsi yang bertetangga dan propinsi-propinsi lain yang tegabung dalam kelompok wilayah B.

(HUHB)

PROGRAM "RGM"

Oleh H. Umar Hasan Basri

Birokrasi merupakan penyakit bagi mulusnya pelayanan. Maka kini Pemda DKI mulai meletakkan pijakan baru bagi pelayanan yang efektif dengan biaya efisien. Untuk proyek ini dilakukan kerjasama dengan "IP-3" dari AS.

DI ERA globalisai ini segala sesuatu berubah dan maju cepat. Tiap lembaga berpacu dalam efisiensi dan efektivitas. Sasarannya ialah teraihnya produktivitas optimal.

Bagaimana lembaga Pemda? Sejauh ini masih terikat dengan birokrasi yang lamban. Maka tak heran jika layanannya sering tertinggal dari lembaga swasta.

Untuk memperbaiki kondisi itu, Pemda DKI Jakarta mulai berbenah. Sejak Gubernur Surjadi dilantik 3 tahun lalu, pembenahan itu berjalan keras. Terlebih dalam upaya menjadikan kota Jakarta setara Ibukota negara lain di dunia dengan warganya yang sejahtera.

Usaha pembenahan terus berlanjut. Pada 4 Oktober 1995 dibukalah Seminar Sehari tentang Perubahan dan Pembaruan Manajemen Pemerintahan (*Reinventing Goverment Management "RGM"*) di lingkungan Pemda Jakarta.

Untuk Seminar itu, Pemda DKI telah meminta "IP3" (*The Institute for Public-Private Partnership, Inc*) dari Washington DC, Amerika Serikat untuk memberikan lokakarya ke pejabat inti Pemda DKI.

IP3 ialah organisasi non-profit. Kiprahnya adalah di bidang diklat dan bantuan teknis guna mengembangkan kemitraan pemerintah-swasta dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan masyarakat tingkat Pemda.

Mensetarakan Jakarta dengan ibukota negara lain dengan warganya yang sejahtera

Organisasi ini sebelumnya telah melatih beberapa pejabat Pemda DKI JAkarta dalam "RGM" (Reinventing Goverment Management) di Washington DC. Dalam waktu bersamaan IP3 juga membantu BAPPENAS dalam menyediakan infrastruktur kemitraan pemerintah dan swasta.

Tujuan utama Pemda DKI kini ialah menjadikan aparatnya sebagai pemberi pelayanan efektif dengan biaya terefisien.

Masalah yang dihadapi DKI ialah untuk menjawab pertanyaan," Cara apakah yang terefektif memperbarui pemerintahan kota dan privatisasi program?"

Pemecahan ini diberikan Infrastruktur inti IP3 yang terdiri 6 pakar, seperti Steve Savas, Ph. D, Gary Powell, Ph. D, dkk.

Sikap Pemda DKI dalam hal ini ialah meminta IP3 untuk mendesain, mengembangkan dan melaksanakan pelatihan dan program bantuan teknis bagi "RGM" (*Reinventing Goverment Management*). Proposal diklat dan agenda program bantuan teknis dimulai 4 Oktober 1995.

Diklat tersebut terdiri 4 langkah.

- Mengadakan lokakarya sehari tentang RGM bagi pejabat kunci Pemda DKI.
- Diklat 5 hari tentang RGM bagi tim inti, terdiri aneka unit di lingkungan Pemda DKI.
- Pengembangan bantuan teknis berfokus pengembangan dua atau tiga proyek percontohan dalam menerapkan program RGM dan privatisasi.

• Mendisain dan melaksanakan rencana "*Rolling out*" (pelaksanaan menyeluruh) tiap proyek percontohan RGM dan privatisasi ke proyek-proyek lain, pelayanan lain dan ke aneka unit kerja di sektor yang sama di lingkungan Pemda DKI.

Program RGM dan privatisasi ini diharapkan berlanjut sempurna ke tiap bidang, hingga diharapkan Pemda DKI Jakarta dapat menjadi acuan bagi kerja Pemda seluruh Indonesia menuju sistem pelayanan optimal dengan biaya minimal.

Menjadikan aparat Pemda DKI sebagai pemberi pelayanan yangefektif.

Peluang ini cukup besar bagi DKI. Soalnya mobilitas sosial dan pertumbuhan ekonominya cukup tinggi. Perusahaan kecil dan menengah kini terus bertumbuh. Diharapkan mereka akan bisa berperan dalam privitasasi pelayanan perkotaan dan kemitraan dengan Pemda.

RGM yang efektif akan mengurangi prosedur birokrasi. Efisiensi jadi meningkat. Fokus pemerintah pun menjadi terarah ke masyarakat sebagai pelanggan lestari. Pelayanan masyarakat juga bisa diswastakan (diprivitisasi). Dan kemitraan dengan swasta bisa dikembangkan ke aneka sektor.

Untuk itu diperlukan SDM (Sumber Daya Manusia) terampil. Maka faktor diklat amatlah menentukan dalam membina SDM yang andal. Maka perlulah adanya lokakarya. Di sini tiap peserta diarahkan untuk 9 ke-mampuan.

• Menguasai konsep-konsep kunci, tema dan ide tentang "*Re-Inventing Goverment*" (RG) dan menempatkannya dalam konteks Pemda DKI.

• Mengembangkan konsep kunci dan gagasan guna mengurangi prosedur birokrasi dan menciptakan proses yang berorientasi pelanggan (customer-driven).

• Menggunakan metode efektif guna menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemda DKI Jakarta melalui pelatihan tentang cara mendesain dan melaksanakan sistem *"Municipal Performance Review"* (Peninjauan Kinerja Pemerintahan Kota).

• Memahami pengertian pokok tentang komponen kunci privitisasi proses penting dalam penerapan program percontohan privatisasi termasuk *vouchers* (para tokoh penjamin) *contracting* dan *pranchise* (penggunaan lisensi).

• Menguasai aneka metoda menetapkan kelaikan kontrak suatu jasa di lingkungan swasta termasuk proses tender, evaluasi, penghargaan dan negoisasi untuk berbagai perubahan privatisasi.

• Menguasi proses rencana guna memonitor kontrak aneka pelaksanaan pekerjaan yang dikontrakkan.

• Mengembangkan rencana kerja strategis guna melaksanakan program pembaruan pemerintahan dan beberapa proyek percontohan privatisasi.

• Mampu melaksanakan proyek dengan baik dan memberi rekonmendasi untuk jangka panjang. Ini tertuju bagi para "pimpro" (pimpinan proyek).

Agar para pejabat kunci menjadi terampil maka usul rencana kerja dari IP3 telah disetujui Pemda DKI yang terdiri 4 langkah.

Langkah I

Lokakarya sehari RGM bagi Pimpinan Unit. Pelaksanaan 4 Oktober 1995. Beberapa peserta lain telah diundang guna berpartisipasi, meneliti, memeriksa aneka konsep kunci, tema dan metoda yang digunakan dalam program *reinventing goverment*, termasuk meneliti cara mengurangi prosedur birokrasi, menciptakan pemerintahan yang

mengutamakan pelayanan masyarakat dan privatisasi aneka fungsi pelayanan.

Lokakarya ini difokuskan ke 4 pokok bahasan teknis.

• Program Kebijakan Strategis guna menggeser sistem birokrasi ke sistem pemerintahan yang bersifat kewirausahaan.

• Menganalisa dan mengevaluasi program reinventing; mendesain dan menerapkan "*Municipal Performance Review* yang bisa berjalan efektif di tingkat kota.

• *Reinventing Fiscal Planning* (Menyusun kembali sistem keuangan): Dampak dari berbagai proses Bu*dgeting Reform* pemerintahan.

• Landasan pemikiran, tujuan dan peluang untuk privatisasi berbagai pelayanan secara v*ouchers* (para penjamin yang menyakinkan), kontrak dan *franchise* (Penggunaan lisensi).

Langkah II

Diklat RGM selama 5 hari. Pelaksanaan 9-13 Oktober 1995. Lama pelatihan 80 jam kerja (langkah I dan II).

Pelatihan ini didisain khusus untuk staf inti Pemda DKI yang akan ikut dalam aneka pengujian berkait strategi kunci, teknik dan proses program RGM termasuk fokus ke aneka cara mengurangi prosedur birokrasi, menciptakan pemerintahan yang memandang masyarakat sebagai pelanggan dan untuk privatisasi aneka fungsi pelayanan publik.

Tujuan diklat singkat ini ialah memperkenalkan peserta akan tanggung jawab terhadap pelaksanaan program reinventing dan privatisasi terhadap masalah yang mungkin mereka temui esok di aneka program reinventing.

Lokakarya 5 hari ini terdiri atas 6 modul.

Modul I tentang RGM: Strategi kebijakan program dan implikasinya.

Modul II tentang : Pergeseran dari pemerintahan birokrasi ke kewiraan: Implikasi strategis bagi Pemda DKI Jakarta.

Model III tentang Reformasi rencana keuangan : Dampak dari aneka proses reformasi anggaran.

Modul IV, tentang alasan, tujuan dan peluang untuk privatisasi aneka sektor pelayanan di Pemda : *Voucher* sektor *contracting, franchise, BOO, Bot* (*Build Own-Operate* dan *Build-Operate-Transfer*).

Modul V tentang Proses Kontrak Dokumen tender, evaluasi, penghargaan (award), negosiasi dan teknik penyeliaan.

Modul VI: Mendesain, mengembangkan dan melaksanakan proyek privatisasi percontohan di sektor limbah padat milik pemerintah kota.

Langkah III

Tentang Proyek Percontohan Pertama dan Pengembangan Strategi secara "*Roll-out*". Pelaksanaan 27 Nov - 9 Desember 95 dan 15-27 Januari 1996.

Lama kegiatan : sekitar 65 jam/ orang per hari untuk satu percontohan.

Langkah IV :

Implementasi Strategi Roll-Out. Pelaksanaan: Desember 1995. Implementasi strategi pelatihan roll out akan dilaksanakan Pemda dengan bantuan IP3. Kedua pihak bekerjasama mengatur tata kerjasama, pengembangan kurikulum, pengelolaan, pelaksanaan pelatihan dan mengatur program bantuan teknis dalam RGM.

Persetujuan kerjasama telah ditandatangani 24 Juli 1995 antara Kepala Diklatprop DKI Hendarin Ono Saleh dengan Presiden The Institute for Publik Private Partnership, Inc, Washington Dc, Mathew L. Hensley.

Sampai tulisan ini diturunkan, langkah I dan II yaitu Lokakarya sehari (4 Oktober) dan dilat 5 hari (9-13 Oktober 1995) telah dilaksanakan.

Langkah III yaitu Proyek Percontohan I dan Pengembangan Strategi secara Roll Out dilaksanakan 27 Nov - 9 Desember '95 dan 15-27 Januari 1996.

Langkah IV juga dilaksanakan dalam Desember 1995, yaitu Implementasi Strategi Roll-out. Semoga usaha ini merupakan titik pijak bagi tercapainya pelayanan sempurna dan pemerintahan yang berdaya wirausaha.

BANYAKNYA PENGGUNAAN WAKTU YANG TIDAK PRODUKTIF BERPENGARUH PADA PELAYANAN MASYARAKAT

Pemda DKI Bantu Empat Perguruan Tinggi Negeri

DWAKIL Gubernur Ekbang, Ir. Tb. M. Rais akhir Oktober 1995 lalu (27/10), secara simbolis serahkan bantuan dana sebesar Rp.1.353.930.000 kepada 4 perguruan tinggi (UI, IKIP Jakarta dan Unpad).

Bantuan kepada Universitas Indonesia (UI), sejumlah Rp.706.465.000 diperuntukkan bagi 13 kegiatan penelitian, 2 diantaranya merupakan program lanjutan, Kepada Institut Teknologi Bandung (ITB) diberikan bantuan dana Rp.220.870.000 untuk 5 kegiatan penelitian, 4 diantaranya merupakan program lanjutan.

Sementara kepada Universitas Pajajaran (Unpad) Bandung diberikan bantuan RP.220.870.000 untuk kegiatan penelitian yang semuanya merupakan usulan baru. Sedangkan IKIP Jakarta memperoleh bantuan Rp.205.725.000 untuk program lanjutan dan diprioritaskan pada kegiatan Pilot Project Pengembangan Manajemen Pendidikan Dasar, dalam kaitannya dengan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun. Bantuan ini diperuntukkan kepada Lembaga Pengembangan Manajemen Pendidikan IKIP Jakarta.

Wagub DKI Bid. Ekbang, Ir. Tb. M. Rais pada kesempatan tersebut menegaskan, pemberian bantuan kepada perguruan tinggi, bukan baru kali ini, karena sejak awal pembangunan jangka panjang tahap pertama, Pemda DKI sangat *concern* untuk melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi.

Diakuinya, dalam pelaksanaan pemberian bantuan ini, pada perjalannya mengalami proses pasang surut, karena sangat tergantung kepada kemampuan dana Pemda DKI.

Sementara itu, Ketua Bappeda DKI, Ir. Budiharjo Sukmadi, MS selaku Ketua Bakor Kerjasama Pemda DKI-Perguruan Tinggi Negeri mengungkapkan, program kerjasama bertujuan untuk saling meningkatkan dan menunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Rektor IKIP Jakarta Prof. DR. Ana Suhaenah Suparno mewakili Perguruan Tinggi penerima bantuan, menilai pemberian bantuan ini sangat berarti dalam menunjang kegiatan pendidikan khususnya, dan dalam pembangunan Bangsa Indonesia umumnya.

Pemberian bantuan ini, ungkapnya lebih lanjut, merupakan hakekat kepedulian dan kerjasama bagi kepentingan bersama dalam membangun negara.

(Zul)

Wagub DKI Bid. Ekbang Ir. Tb. M. Rais menyerahkan bantuan kepada Rektor UI Prof. DR. Tadjudin; Rektor ITB, Prof. DR. Wiranto Arismunandar; Rektor Unpad, Prof. Dr. Endang Syaifullah dan Rektor IKIP Jakarta DR. Ana Suhaenah S

KECAMATAN TEBET

MENGANDALKAN DEDIKASI DAN KETERAMPILAN

Pada hakikatnya camat selaku kepala wilayah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) No. 5/ 1974, berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan pokok-pokok kegiatan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

INILAH awal kata Camat Tebet Drs. M. Syarif Hassan, kepada *Media Jaya* di kantornya setelah itu secara panjang lebar bertutur tentang wilayahnya.

Namun, katanya lagi, usaha itu senantiasa dipengaruhi oleh kemauan, keterampilan dan dedikasi yang tulus dari semua aparat pemerintah terkait. Dibarengi partisipasi dan kesadaran yang tinggi dari seluruh lapisan masyarakat.

Sebagaimana dicantumkan dalam UU itu tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah bahwa camat sebagai wakil pemerintahan pusat adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Camat sebagai pelaksana pembangunan di wilayahnya mempunyai beberapa kewajiban. Disamping sebagai pelaksana terdepan yang merupakan ujung tombak pelaksanaan pembangunan.

"Dalam kegiatan yang cukup menonjol di wilayahnya tahun 1990/1995 adalah masalah pengentasan kemiskinan. Di mana dalam wilayah Kecamatan Tebet terdapat dua wilayah Kelurahan

Camat Tebet Drs. M. Syarif Hassan bersama Muspika Kec. Tebet ketika Apel memperingati Hari Ikada.

Instruksi Gubernur, yaitu kelurahan kumuh dan miskin seperti kelurahan Manggarai RW 04 dan Kelurahan Bukitduri RW. 11," kata Syarif Hasan.

Dalam kegiatan ini Syarif Hasan mengharapkan, agar dukungan masyarakat luas untuk dapat diberikan pembinaan yang positif, terutama dalam mengendalikan kemiskinan. Peran serta masyarakat dimaksud dapat disalurkan melalui organisasi masyarakat LKMD/K, RT/RW maupun organisasi sosial kemasyarakatan lainnya.

Terselenggaranya berbagai kegiatan dengan lancar, berarti situasi dan kondisi perekonomian masyarakat Kecamatan Tebet semakin mantap dan terkendali. Hal ini berarti pula usaha serta kegiatan-kegiatan di bidang perekonomian cukup mendapat perhatian serius. Khususnya untuk menggalang kerja sama antara pengusaha/pedagang melalui koperasi.

Untuk melanjutkan semua itu, tidak kalah pentingnya adalah menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas dalam pendayagunaan personel yang dibina oleh Pemerintah DKI Jakarta, agar mampu melaksanakan bidang administrasi maupun operasional. Pengendalian di bidang administrasi, secara intensif dilaksanakan di bidang tata usaha dan perlengkapan, baik yang bersifat statis maupun dinamis. Di bidang ini pulahlah pendistribusian semua perlengkapan dilaksanakan yang menyangkut pengertian administrasi secara sempit.

Melihat volume pelaksanaan tugas-tugas yang begitu padat, maka untuk berhasil atau tidaknya pelaksanaan tugas bergantung dari dedikasi atau pengabdian personel serta masyarakat secara aktif.

Pelaksanaan Pembangunan

Drs. M. Syarif Hassan baru

Wagub DKI bidang Kesra RS. Museno dalam kunjungan kerjanya memberikan bantuan kepada pengurus Masjid Al Maksum.

memangku jabatannya sejak 7 September 1995 lalu, yang dalam melaksanakan tugasnya, dia bilang punya terobosan baru, yaitu Safari Subuh. Dilakukan setiap Minggu, bergiliran pada masjid di kelurahan yang menyelenggarakannya.

Terdapat 54 masjid pada tujuh kelurahan bawahannya, yaitu Kelurahan Menteng Atas, Tebet Barat, Tebet Timur, Kebon Baru, Bukitduri, Manggarai Selatan dan Kelurahan Manggarai. Dalam acara safari Subuh itulah sekaligus diadakan pengarahan dan juga penyuluhan tentang misi pembangunan di DKI Jakarta, termasuk sebagai masukan dari warga setempat.

Camat Syarif Hassan menuturkan, pembinaan pemerintahan kelurahan dilakukan untuk mendayagunakan semua aparat kelurahan. Salah satu tugas dari camat adalah melakukan pembinaan intensif, dan pembinaan ini dilakukan dengan program kecamatan terpadu oleh masing-masing instansi vertikal maupun aparat pemerintahan kelurahan.

Sementara pembinaan terhadap organisasi masyarakat yang dibina langsung oleh Pemda DKI Jakarta, yaitu RT/RW sebagai partner pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan di wilayah kelurahan melalui penataran bagi pengurus RT/RW.

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan peran serta masyarakat tentang program transmigrasi, telah diadakan penyuluhan atau ceramah tentang program transmigrasi kepada masyarakat di wilayah kelurahan-kelurahan se-Kecamatan Tebet secara bergilir.

Penyuluhan dilakukan oleh tim dari Kanwil Departemen Transmigrasi DKI Jakarta, yang dilanjutkan dengan pemutaran film. Setiap penyuluhan dihadiri oleh 200 orang. Adapun jumlah warga di wilayah Kecamatan Tebet yang telah bertransmigrasi pada tahun 1994/1995, sampai Maret 1995 tercatat 30 KK atau 94 jiwa.

Sesuai Instruksi Gubernur DKI Jakarta No.608, tanggal 5 Juli 1994, tentang petunjuk pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan pembangunan kelurahan tertinggal di DKI Jakarta, Camat selaku kepala wilayah Kecamatan dengan fungsinya telah mengko-

ordinasikan pendataan di tujuh kelurahan. Yang secara prinsip dinilai kumuh dan penduduknya dinilai mempunyai masalah sosial ekonomi.

Dari hasil-hasil pendataan yang dilaksanakan dua kelurahan, yaitu Kelurahan Manggarai 5 RW dengan penduduk 1.410 KK dan Kelurahan Bukitduri 9 RW, dikategorikan sebagai darah kumuh dan miskin.

Untuk sukesnya penanggulangan pemukiman kumuh dan meningkatkan taraf hidup penduduknya, telah dibentuk atau dihimpun kelompok-kelompok masyarakat (Pokmas) untuk diberikan bantuan modal bergulir.

Tahap pertama bantuan ber-gulir telah diberikan kepada Kelu-rahan Manggarai 5 Pokmas @ 20 KK = 100 KK dan Kelurahan Bukitduri 5 Pokmas @20 KK=100 KK. Dari 2.972 KK yang perlu mendapat bantuan modal bergulir. Sedangkan 2.772 KK belum mendapatkannya, dan akan diatur dalam tahap selanjutnya.

Mengenai sukses Instruksi Presiden (In-pres), Syarif Hassan mengungkapkan, pada hakikatnya pembangu-nan di wilayah diprogramkan melalui *Bottom Up Planning* yang telah dibudidayakan dalam kehidupan masyarakat. Dari program itulah kegiatan diarahkan untuk merealisasikan proyek penyelesaian mendadak.

Dalam kaitan inilah pemerintah memberikan Inpres guna menunjang proyek sebagaimana yang telah diusulkan. Di samping itu bantuan diberikan pada pengusaha ekonomi lemah dengan maksud meningkatkan kegiatan usaha. Di wilayah Kecamatan Tebet yang telah diberikan bantuan di antaranya penggrajin sepatu/bola dan pengrajin jamu, dibawah pengawasan instansi setempat.

Selama ini kegiatannya belum menunjukkan perkembangan yang lebih baik ditinjau dari segi adaministratif terutama dalam pengelolaan keuangan. Sungguhpun demikian, usaha pembinaan tetap dilaksanakan dalam rangka pembinaan administrasi maupun kerja sama LKMD/L. Sehingga, diharapkan hubungan timbal balik dapat terwujud guna meningkatkan kegiatan usaha yang dimaksud. Disamping juga mengalakkan program PKK dengan orientasi kegiatan diarahkan, seperti terselenggaranya posyandu dan kebersihan lingkungan.

Camat Tebet ketika menyerahkan piala kepada pemenang lomba Penghayatan dan Pengamalan P-4 murid SD dan SLTP.

Kecamatan Tebet

Kecamatan Tebet di Kotamadya Jakarta Selatan mempunyai luas wilayah 952,60 hektar, terbagi dalam tujuh kelurahan, 81 Rukun Warga, dan 1.017 Rukun Tetangga. Batas wilayah sebelah utara Kali Malang-Kali Cideng, wilayah timur Kali Ciliwung, wilayah selatan jalan Jenderal Gatot Subroto dan jalan Letjen Haryono MT, sedangkan wilayah barat Kali Cideng dan Kali Kuningan Timur.

Jumlah penduduk Kecamatan Tebet sampai akhir September 1995 tercatat 282.827 jiwa, terdiri dari 147.784 lelaki dan 138.043 perempuan. Kepadatan penduduk 29.708 jiwa per Km, sedangkan jumlah Kepala Keluarga (KK) tercatat 70.411.

Untuk sarana keagamaan terdiri dari masjid 54, musholla 218, gereja 10 dan majelis taklim 157. Sarana pendidikan meliputi taman kanak-kanan (TK) swasta 52, SDN 36 dan swasta 21, SLTP Negeri 6 buah dan swasta 14 buah, SLTA Negeri 4 buah dan swasta 18 buah, serta perguruan tinggi swasta 2 buah. Sedang fa-silitas kesehatan seperti rumah sakit 1 buah, puskesmas 11, rumah sakit bersalin 13 buah, poliklinik 13 buah, BKIA 81, serta apotik 18 buah dan laboratorium 3 buah.

Camat Tebet Drs. M. Syarif Hassan dilahirkan di Jakarta 9 September 1945, yang juga lulusan sarjana LAN 1989. Sebelumnya adalah wakil camat di Mampang Prapatan dan Pasar Minggu.

(Ss)

KELURAHAN CIJANTUNG

Perbedaan Kelurahan di wilayah DKI Jakarta membawa dampak perkembangan kawasan. Ada Kelurahan maju. Ada yang biasa-biasa saja. Ada pula yang tertinggal. Hal ini sangat tergantung kepemimpinan kelurahan bersangkutan dan dukungan warganya.
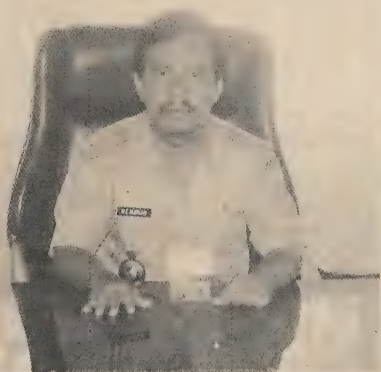
Lurah Cijantung H. Enung Nursan

KELURAHAN Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Kotamadya Jakarta Timur ini termasuk Kelurahan biasa saja. tidak ada yang menonjol. Hanya kaya sarana pendidikan dan keagamaan. "Tapi masih tetap biasa-biasa saja," ucap Lurahnya, H. Enung Nursan.

Lurah Enung mengungkapkan, dalam pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1979 menyebutkan Kepala Kelurahan adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas kata Enung, senantiasa berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) No. 6/1983 pasal 3 ayat (1), bahwa pembinaan wilayah/Kelurahan dibagi dalam 5 urusan, Urusan Pemerintahan, Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Kesra serta Keuangan dan Umum.

Semua kegiatan tersebut merupakan perpaduan antara kegiatan Pemerintahan Kelurahan dengan bimbingan dari semua lintas sektoral yang terkait, maupun partisipasi masyarakat.

Sehubungan itu, Lurah Enung menilai semua partisipasi masyarakat sangat diperlukan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan.

Rangkaian Kegiatan

Selanjutnya Lurah Enung menjabarkan hasil rangkaian kegiatan di kawasannya. **Dalam Bidang Pemerintahan,** melalui peningkatan administrasi kantor, kependudukan dan pelayanan masyarakat, pihaknya selalu berupaya memberikan pelayanan sebaik-baiknya ke masyarakat.

Khusus mengenai pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang sebelumnya paling lambat 14 hari, mulai Agustus 1988 telah melaksanakan program KTP sehari jadi.

Kegiatan lain, mengadakan peremajaan pengurus RT/RW yang telah habis masa baktinya. Mengikuti pengurus RT/RW untuk mengikuti penataran tehnis RT/RW bagi yang belum mengikuti juga menerima dan menyampaikan SPPT PP wajib pajak Menginventarisasi anggota Eks Tapol G.30-S/PKI dan menyelenggarakan penaratan P-4.

Dalam bidang Ketertiban, membina perangkat ketertiban, seperti pengiriman latihan bagi anggota pertahanan sipil (Hansip), balakar dan latsar.

Di samping itu, penyusunan program kerja seperti jadwal pelaksanaan siskamling tingkat RT/RW dan piket Kelurahan. Juga penyuluhan hukum ke masyarakat. Kemudian mengarahkan masyarakat menanamkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam bidang Perekonomian dan Pembangunan, pihak Kelurahan mengadakan pembinaan yang ada di wilayah Kelurahan Cijantung, menghimpun potensi swadaya masyarakat, mengadakan pembinaan terhadap pengusaha ekonomi lemah dalam bentuk pengarahan, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam membangun dan memfungsikan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/ Kelurahan (LKMD/K).

Selanjutnya, meningkatkan pembangunan, baik yang bersifat swadaya masyarakat maupun mengarahkan bantuan dari pemerintah. Juga meningkatkan partisipasi masyarakat dengan kerjasama antara pemerintah dengan instansi terkait maupun pihak PKK.

Membangun masjid dengan swadaya murni masyarakat, namanya Masjid Nurul Ikhlas.

Dalam bidang Kesra, pihak kelurahan berusaha meningkatkan kesejahteraan warganya, dengan membina keterampilan melalui program wajib belajar, memantapkan kerukunan antar umat beragama, membina Majelis Taklim yang ada di tingkat RW. Juga pembinaan terhadap remaja, karang taruna dan pramuka, membantu menyebarluaskan program transmigrasi.

Pemasukan zakat, infaq dan sedekah (ZIS), ditingkatkan. Program Keluarga Berencana, penataran Kader Posyandu dan Kader Kesehatan, terawih keliling pada bulan Ramadhan terus digiatkan.

Dalam bidang Keuangan dan Umum, menyelenggarakan tata usaha dengan sistem pola baru dan kearsipan pola baru, melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, menjaga kebersihan dan ketertiban kantor.

Penyelenggaran Urusan

Lurah Enung menjelaskan, berdasarkan SK Gubernur KDKI Jakarta No. 1251 tanggal 29 Juli 1986, ditetapkan luas wilayah Kelurahan Cijantung 238,57 Ha, terbagi habis menjadi 11 RW dan 85 RT.

Batas sebelah Utara dengan Kali Cijantung/jalan masuk Komplek Cijantung, sebelah Timur dengan Kali Baru, sebelah Selatan dengan jalan Belly/Kali Gongseng/jalan Desa/Blok Terompet/ Saluran Kuming Balok, sebelah Barat dengan jalan Guru Sri/jalan Beringin/Saluran air/jalan Batu/ jalan Lapangan Merah.

Kelurahan Cijantung 1994/ 1995 berpenduduk 27.526 jiwa, terdiri atas 14.497 jiwa lelaki dan 13.029 jiwa perempuan. Penduduk menurut mata pencaharian terbanyak adalah karyawan swasta, pengawai negeri sipil dan pedagang.

Status tanah di Kelurahan Cijantung terdiri dari tanah milik adat seluas 145,324 Ha, tanah negara 82,746 Ha, Tanah Wakaf 1,84 Ha dan lain-lain 8,66 Ha. Sedangkan peruntukan tanah bagi perumahan seluas 200,801 Ha, fasilitas umum 5,256 Ha, pertanian/perikanan 30,013 Ha dan pemakaman 2,5 Ha. menurut jenis

Kegiatan Simulasi oleh Ibu-ibu PKK Kelurahan Cijantung.

Kerja bakti warga membersihkan saluran dan kali, lokasi Kali Baru

tanah terdiri dari tanah darat seluas 129,255 Ha, tanah sawah 30,013 Ha dan lain-lain 49,621 Ha.

Menurut Lurah Enung, pembangunan yang dilaksanakan secara terpadu baik yang dilaksanakan secara swadaya murni masyarakat maupun bantuan dari Pemerintah, yang perencanaannya melalui musyawarah RT/RW atau dikenal dengan istilah perencanaan dari bawah, sangat dirasakan manfaatnya dan benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat/ warga.

Pembangunan dimaksud adalah pembangunan non fisik dan pembangunan fisik. Adapun pembangunan non fisik berupa: Pelaksanaan penataran Kader-kader, kursus-kursus keterampilan, pembinaan mental spiritual dan kegiatan bulan bakti LKMD/K. Sedangkan pembangunan fisik seperti: Pembangunan prasarana perhubungan, prasarana sosial, prasarana perekonomian dan prasarana produksi.

Dari seluruh rangkaian kegiatan pembangunan yang dilaksanakan selama 1994/1995, dana yang dikeluarkan dari bantuan pemerintah sebesar 4,5 juta rupiah dan swadaya murni masyarakat 177,6 rupiah lebih.

Penduduk Kelurahan Cijantung sebagian besar memeluk agama Islam yaitu 21.129 jiwa atau 76,76%. Katolik 3.210 jiwa atau 11,66%, Protestan 2.681 jiwa atau 9,24% dan Hindu/Budha 506 jiwa atau 1,84%. Di kelurahan ini terdapat 14 masjid, 29 mushollah, 5 gereja dan 1 pure.

Sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Cijantung berupa taman Kanak-Kanak 8, Sekolah Dasar 11, SLTP 6, SLTA 9 serta Madrasah, Akademi dan Universitas masiing-masing 1.

Sementara sarana olahraga yang ada seperti Lapangan Sepakbola 2, Bulutangkis 6 dan Bola Volly 11, serta Kolam Renang 1.

Lurah Enung merasa bangga karena hasil pengumpulan ZIS di kelurahannya selalu melampaui target. Target ZIS 1994/1995 sebesar 3,5 juta rupiah. Tapi realisasinya sampai akhir Maret 1995 mencapai 5 juta rupiah lebih atau 145,2%.

(SS)

KEDOYA UTARA

Kelurahan Sarat Tantangan

Lurah Kedoya Utara, H. Rois E. tengah menerima laporan dari setap Pos PIN yang ada di wilayahnya tanggal 13 September 1995, PIN putaran pertama

UJUNG tombak pelaksanaan pembangunan di wilayah DKI Jakarta, sebenarnya berada pada aparat kelurahan yang harus senantiasa mempunyai kemauan dan kemampuan bekerja keras membangun wilayahnya," kata Kepala Kelurahan Kedoya Utara H. Rois E, saat berlansungnya Pekan Imunisasi (PIN) pertama, 13 September 1995 lalu.

Dalam pelaksanaan PIN putaran pertama Kedoya Utara me-nargetkan 2.766 balita yang diimunisasi polio, namun di lapangan ternyata melampaui target, yaitu 4.441 balita. Jumlah ini meliputi RW.01 (384), RW.02 (785), RW.03 (296), RW04(709), RW05 (395), RW .06 (664), RW.07 (528), RW.08 (650) dan RW.09 (30 balita).

Seperti dikatakan Ketua PKK Kedoya Utara, Ny. Rois E, PIN diwilayahnya diselenggarakan di 28 tempat yang dijadikan pos PIN, meliputi taman kanak-kanak (TK), rumah anggota pengurus PKK, rumah tokoh masyarakat, beberapa rumah warga, dan di rumah-rumah pengurus RT/RW setempat. Akan halnya wilayah kelurahan lainnya di DKI Jakarta, dengan penyelenggaraan PIN ini membuktikan semangat warga masyarakat kelurahan ini tak kalah giatnya dalam mendukung program pemerintah yang bersifat nasional.

Pun, ketika pelaksanaan putaran kedua, 18 Oktober 1995, hasilnya tidak mengecewakan, yaitu tercatat 5.115 balita yang diimunisasi polio. Lurah menegaskan, semua ini berkat kerja sama unsur aparat dengan warga setempat. Menurut dia, sebagai lurah harus mampu membaca sesuatu yang menjadi kebutuhan warganya. Mustahil memproaktifkan peranan masyarakat dalam melaksanakan program Pemda, apabila aparat sendiri tidak mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi warganya.

Akan halnya dalam mengimplemetasikan amanat Renstra Pembangunan DKI Jakarta dan GDN (Gerakan Disiplin Nasional). Langkah pertama yang ia lakukan adalah menanamkan pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu Resntra dan GDN yang dicanangkan pemerintah itu. Kemudian melakukan pendekatan serta menjabarkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Baik terhadap aparat kelurahan dan segenap unsur yang ada. Seperti RT/RW, PKK, majelis taklim, remaja masjid, karang taruna, pramuka, organisasi kemasyarakatan, serta para tokoh setempat.

Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah

Lurah H. Rois E dan aparat kelurahan Kedoya Utara berupaya melakukan pembinaan terhadap para pengurus RT/RW serta pengurus koperasi dan pengusaha ekonomi lemah.

Koperasi yang dibangun adalah koperasi pasar di pasar Inpres Pesing Koneng, sampai saat ini telah merangkul, sebanyak 171 anggota. Pengelolaan koperasi

Arli Aulia Esa, kelahiran 9 Desember 1993, terlihat seusai mendapat imunisasi polio 13 September '95, terperanjat sesaat diambil gambarnya.

diserahkan kepada PD Pasar Jaya.

Dalam program pembinaan insan koperasi, dilakukan penyuluhan yang bekerja sama dengan kantor Koperasi Jakarta Barat. Di samping itu berbagai pertemuan antara anggota dengan pihak lainnya, untuk meningkatkan citra dan peranan koperasi di kalangan masyarakat penduduk kelurahan Kedoya Utara.

Dalam menunjang peningkatan usaha warga yang berpenghasilan rendah serta para pengusaha ekonomi lemah, dilakukan kegiatan yang dikaitkan dengan Usaha Pendapatan Keluarga (UP2K) melalui berbagai jenis kegiatan.

Sektor pertanian dan peternakan kegiatannya adalah penyuluhan dan bimbingan tentang cara pemanfaatan tanah pekarangan untuk bercocok tanam, seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan ta-naman apotek hidup. Tujuannya untuk menunjang ekonomi keluarga ekonomi lemah khususnya. Pelaksananaan pembinaan dilakukan Sudin Peternakan dan Pertanian.

Sektor kerajinan (*home industry*), dilakukan kegiatan pelatihan keterampilan antara lain jahit menjahit, pembuatan keset, sabun, makanan dan sebagainya melalui proyek Usaha Kerja Produktif (UKP).

Sedang dalam bidang Keluarga Berencana, pasangan usia subur yang ada di kelurahan Kedoya Utara sebanyak 4.500 PUS, jumlah akseptor 4.095 orang, dengan pusat pelayanan terdapat di beberapa tempat seperti PPKB 18, Posyandu 12, PPKB di tiap RT 75 buah.

Era Globalisasi

Target akseptor 1995/1996 adalah 1.000 peserta akseptor. Untuk mencapai target ini telah dikoordinasi setiap bulannya melalui rapat KB. Sedangkan pendataan PUS yang diikuti TKBK swadaya, pembinaan BKM di tiap RW yang diikuti oleh OLB swadaya, dan membangun komunikasi antar PLKB dengan dokter dan bidan swasta.

Dalam pembinaan wanita, pemuda dan pramuka, Rois E. mengatakan bahwa kegiatan ini ditampung melalui wadah karang taruna, baik di tingkat kelurahan, RW/RT, yakni Sub Unit Karang Taruna RT.

Untuk bidang-bidang lainnya seperti olahraga (sepak bola, tenis meja, *Volley*, tenis, bulu tangkis, catur gerak jalan, senam kesegaran

Warga sedang menungguh giliran Balitanya di Pos III PIN untuk mendapatkan imunisasi polio.
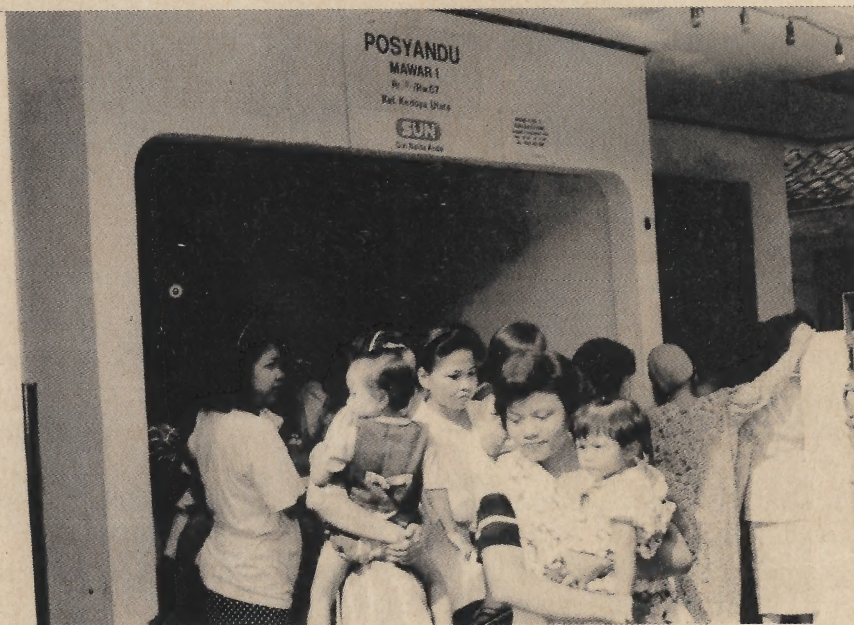
Setelah dapat giliran, balita dibawa pulang, untuk kembali pada putaran II 18 Oktober 95 di Pos III/PIN

jasmani, lari marathon dan pencak silat), kesenian (drama, vokal group, tari dan qasidah). Bidang agama dilakukan melalui ceramah dan pengajian, baik tingkat kelurahan maupun RW.

Anggota pramuka di kelurahan ini berjumlah 1.000.505 orang, terdiri tingkat siaga, penggalang, penegak, pembina, mabigus, gudep, mabisa dan korsa. Kegiatan yang dilakukan seperti baris berbaris, drum band, bakti sosial dan berbagai kegitan lainya seperti dikelurahan, kecamatan, walikotamdya, maupun di perkemahan cibubur dan Istana Negara.

Keluraha Kedoya Utara dalam pengumpulan zakat infaq; dan sedekah (ZIS) sampai pada bulan September 1995 mencapai Rp. 1.036.000,-.Dalam pengumpulan ZIS pihak kelurahan berupaya mengikutsertakan unsur LKMD/K, RT/RW serta tokoh-tokoh masyarakat dan alim ulama kelurahan Kedoya Utara.

Di bidang kebersihan, dilakukan shelter bis, puskesmas, sekolah-sekolah, jalan umum dan tempat-tempat umum lainnya. Kebersihan ini terjaga berkat keperdulian aparat setempat dan warga terhadap lingkungan di sekitarnya.

Beberapa tokoh masyarakat dan pengurus RT/RW mengatakan, bahwa Pemda DKI Jakarta sudah saatnya membantu kelurahan Kedoya Utara, untuk perangkat komputer dan *facsimile*. Peralatan tersebut sangatlah penting bagi kelurahan, terutama dalam era globalisasi. Dimana kecepatan komunikasi dan informasi saat ini perlu diimbangi segenap anggota masyarakat, tidak terkecuali warga kelurahan Kedoya Utara.

Harapan lainnya, seyogianya sebagai pengurus RT/RW diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan pemerintah dalam keringanan bantuan pemassangan telepon oleh pihak Deparpostel, khususnya Telkom. guna memperlancar berbagai kegiatan yang frekuensinya semakin meningkat menghadapi pesta demokrasi/pemilu 1997 yang akan datang. Anggaplah pemerintah, khususnya Telkom menyelenggarakan "telepon masuk desa" atau kalau di Jakarta dapat digunakan "telepon masuk warga".

Demikian harapan para pegurus RT/RW di DKI Jakarta.

(Llas)

SDM

Kakanwil Deptrans DKI:

POTENSI TRANSMIGRAN DKI

Kini transmigran asal DKI telah banyak yang sukses. Malah diantara mereka, ada yang memiliki 12 truk, 8 motor air dan 4 mesin giling padi. Transmigran akan terus dikirim ke berbagai daerah setelah diseleksi dan disiapkan dengan matang.

Drs. Haryo Kusumo Wardono, Ka. Kanwil Deptrans DKI Jakarta

SUARA sumbang mengenai transmigran asal DKI Jakarta di berbagai daerah, seperti Pontianak, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Lampung, sampai Irian Jaya, tentu saja membuat risi Kanwil Departemen Transmigrasi DKI Jakarta.

Ia memang bertanggung jawab atas nasib para transmigran asal DKI Jakarta tersebut. Bahkan tak sedikit kritik yang dilontarkan ke lembaga yang menangani pengiriman transmigran tersebut.

Antara lain karena nasib transmigran asal DKI Jakarta masih menggelandang, menjadi pengemis bahkan lebih kritis lagi masih tetap gembel.

Di bawah ini wawancara Media Jaya dengan Kakanwil Departemen Transmigrasi DKI Jakarta, Drs. Haryo Kusumo Wardono tentang apa, siapa dan bagaimana trasmigran asal DKI Jakarta di lokasi pemukimannya terbaru.

Media Jaya (MJ): "Bagaimana sebenarnya kondisi transmigran asal DKI Jakarta di lokasi pemukimannya yang baru. Benarkah nasib mereka separah apa yang dilansir di berbagai media massa belakangan yang menyebutkan banyak transmigran asal DKI Jakarta terlunta-lunta dan menjadi gelandangan dan pengemis (gepeng).

Apakah ketika mengirimkan mereka ke lokasi transmigran mereka tidak dibekali ilmu pengetahuan yang cukup atau keterampilan?

Drs. Haryo Kusumo Wardono (DHKW): "Terima kasih atas kritik tersebut. Namun sangat disayangkan, kritik itu salah alamat. Karena seluruh transmigran asal DKI Jakarta yang swakarsa murni, belum prnah ada laporan yang menyebutkan mereka hidup terlantar.

Karena, sebelum mereka berangkat ke penampungannya, terlebih dulu dibina secara intensif mengenai keterampilan dan ilmu pengetahuannya.

Bila mereka menempati lokasi transmigran tersebut, mereka benar-benar sudah siap tempur.

Pihak Kanwil Departemen Transmigrasi DKI Jakarta, terus memantau intensif kerjasama dengan Kanwil Deptrans daerah, hingga segala sesuatunya dapat terpantau hidup menggelandang atau jadi gembel, itu mungkin bukan transmigran binaan yang di tangani lembaga lain."

MJ : "Bagaimana mekanisme penyeleksian transmigran asal DKI Jakarta sebelum dikirim ke berbagai daerah, hingga keberadaannya di Unit Penampungan Transmigran (UPT) bisa dipertanggung jawabkan kualitasnya?"

DHKW : Kanwil Deptrans DKI Jakarta, dan Pemda DKI Jakarta

lebih dahulu membinanya di Balai Latihan Kerja (BLK) berfungsi sebagai tempat pembinaan dana peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Di BLK tersebut, mereka dibina sesuai keterampilan dan kemampuan masing-masing. Jika di BLK tersebut mereka benar-benar sudah mampu menerapkan kemampuannya, baru diberikan pembekalan bagaimana menjadi transmigran yang baik.

Di DKI Jakarta ini, sebenarnya punya potensi besar untuk calon transmigran, namun belum dapat direkrut seluruhnya. Ini merupakan tantangan bagi Pemda DKI Jakarta, khususnya Kanwil Deptrans.

Karena, tiap tahunnya, tak kurang 200.000 orang urban yang datang ke Jakarta. Sedangkan jumlah penduduk DKI Jakarta kini 8,2 juta jiwa, ditambah pertumbuhan penduduk secara alami yang masih cukup pesat."

Aspek Teknis

MJ : Berapa potensi yang ada itu bisa terserap menjadi transmigran swakarsa. Dan apa kendalanya jika ternyata dari seluruh potensi itu tak terserap?

Guna mengatasi kendala tersebut, langkah apa yang dilakukan pihak Kanwil Deptrans, hingga dapat menanggulanginya dan pengarahannya, sehingga mereka bisa menjadi transmigran swakarsa.

DHKW : Memang tak semuanya bisa terserap, karena menyangkut berbagai aspek, termasuk aspek teknis.

Guna mengatasinya dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak, terutama pihak swasta untuk melatih mereka, sambil mencari daerah sasaran, sesuai potensi calon transmigran yang dipersiapkan.

Sebenarnya, kita masih sangat membutuhkan banyak BLK untuk pembinaan para calon transmigran. Namun hingga kini jumlah BLK di lima wilayah Jakarta memang masih belum memadai.

Karenanya, kami mengimbau pihak swasta berpartisipasi menyediakan atau membangun BLK sebagai kepedulian sosialnya untuk menunjang program rencana strategis (renstra) lima tahun Pemda DKI Jakarta (1992-1997).

Drs. Sugihardjo

Daerah sasaran kami adalah daerah yang padat penduduknya, pemukiman kumuh, daerah yang terkena proyek pembangunan, daerah bantaran sungai, sepanjang pinggir rel kereta api dan sebagainya.

Daerah-daerah itu sangat potensial dan perlu digali. Mereka rata-rata pendatang baru (urban) yang tak memiliki tempat tinggal tetap.

MJ : Bagaimana dengan peran gelandangan dan pengemis (gepeng). apakah mereka juga termasuk potensi yang baik untuk transmigran?

DHKW : Selama ini, kami belum pernah membina calon transmigran gepeng. Yang kami tahu, lembaga yang menangani masalah itu adalah Dinas Sosial. Jika ternyata ada transmigran gepeng asal DKI Jakarta dan hidupnya di lokasi baru itu tetap menggelandang, bukan Kanwil Deptrans DKI cuci tangan, tapi memang bukan tanggung jawab kami.

Itu tanggung Jawab Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Sosial Daerah. Karena, kami mengirimkan transmigran asal DKI Jakarta ke suatu daerah dengan harapan, mereka dapat meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan keluarganya, sesuai program Pemda DKI maupun Pemerintah Pusat.

Untuk itu, guna merekrut calon transmigran, kami koordinasi dengan berbagai pihak: Lurah, Camat, Sospol, dan pihak kepolisian, hingga kondisi mereka benar-benar bisa dipertanggung jawabkan.

MJ : Bagaimana pendapat Anda tentang penilaian banyak transmigran asal DKI Jakarta kurang berhasil di Unit pemukiman Transmigran (UPT)?

DHKW : Pendapat itu tidak benar. Karena banyak transmigran asal DKI Jakarta yang berhasil menjadi transmigran Teladan. Misalnya dari Bengkulu, tahun